

Permasalahan Pendidikan Berkenaan dengan Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Dasar

Ali Saifullah

Abstract: An educational postulate states that the longer compulsory education in the national education system the higher the quality and progress of the nation, and finally the higher the quality of the human resources. The postulate is specifically fulfilled by three concepts and five characteristics of basic education. The three concepts include literacy education, citizenship, and basic education for all people. The five characteristics are related to universal inclusiveness, cost, compulsoriness for certain age, development of democratic values, and provision by governmental institutions. There are some problems concerning the development of the compulsory education, such as interconnection and stratification, transfer system and exams, budget, teachers's quality and their availability.

Kata-kata kunci: permasalahan pendidikan, wajib belajar, pendidikan dasar.

Apabila membicarakan masalah pendidikan dasar, sering kali orang memberikan tanggapan yang kurang serius, karena menganggap hal itu sebagai masalah yang sepele dan sederhana. Padahal masalah itu sebenarnya merupakan isu sentral dalam kehidupan bangsa dan negara manapun. Panjang pendeknya jangka waktu pendidikan dasar merupakan indikator kemajuan masyarakat seperti yang tertuang pada konsep istilah masa kewajiban belajar yang diberlakukan kepada seluruh warga negara. Itu

Ali Saifullah adalah dosen Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan (KTP) FIP IKIP MALANG.

berarti bahwa semakin tinggi usia wajib belajar maka semakin maju perkembangan bangsa dan negara, dan hanya masyarakat maju dan mampu yang dapat melaksanakan tugas tersebut.

Tempat kedudukan pendidikan dasar juga banyak terkait dengan isi peningkatan sumber daya manusia dan usaha peningkatan taraf hidup seluruh warga negara yang dibarengi oleh apa yang disebut program Inpres Desa Tertinggal. Hal ini dapat dibuktikan dengan siklus hubungan lingkaran setan antara status kesehatan, pendidikan dan taraf hidup atau kehidupan ekonomisnya. Hanya mereka yang memiliki dasar pendidikan yang relatif tinggi akan berkembang sumber daya manusianya dan akan menjadi tenaga kerja yang produktif, sehingga cukup mampu membiayai kebutuhan kesejahteraannya sebagai manusia yang beradab. Pendidikan dasar yang berkualitas merupakan syarat mutlak bagi pengembangan warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya.

Pada tulisan ini akan dibahas tiga pokok bahasan. Yang pertama adalah uraian tentang beberapa konsep fundamental pendidikan dasar dan yang kedua tentang pendidikan dasar 9 tahun, kemudian diakhiri dengan permasalahan yang hadir sebagai implikasi dari pengembangan wajib belajar 9 tahun pendidikan dasar di Indonesia.

Sebelum pembahasan dimulai, menarik untuk merenungkan pendapat David A. Goslin berikut ini:

The ecological concentration of negro and other ethnic low-income groups in urban communities made the provision of adequate educational facilities in these areas extremely difficult. Inadequate budgets, overcrowding, the reluctance of competent teachers to work in such areas, subcultural resistance on the part of the children educational problems such as extreme cultural deprivation, language barriers, lower health standard and necessity of many children to hold jobs in order to aid in supporting their families all have contributed to the problem of educating these groups (Goslin, 1965:80).

Uraian di atas menggambarkan secara jelas permasalahan pengembangan pendidikan pada masyarakat daerah tertinggal, seperti pada daerah kumuh perkotaan atau desa miskin, yang umumnya disebabkan oleh kondisi lingkungan fisik dan sosial yang tidak kondusif. Anak-anak yang berasal dari daerah semacam itu pada dasarnya akan mengalami proses perenggutan kebudayaan, standar kesehatan yang rendah, memasuki

pasaran kerja sebelum menyelesaikan pendidikan dasarnya, anggaran pendidikan yang rendah, dan terbatasnya ketersediaan guru. Kesimpulannya, mereka yang hidup di daerah tertinggal itu akan terus terbelakang, baik secara intelektual, sosial, moral, maupun tingkat ekonomi.

Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara yang sedang membangun perlu memperhatikan secara lebih cermat pelaksanaan pendidikan dasarnya, terutama apabila dikaitkan dengan arti penting pendidikan dasar bagi pengembangan sumber daya manusia suatu bangsa. Pengembangan sumber daya manusia itu terkait dengan kemampuan penyesuaian diri generasi muda terhadap masyarakat dunia yang bersifat global dan teknologis (Diaz, 1992).

BEBERAPA KONSEP PENDIDIKAN DASAR

Sejumlah buku pustaka terkait mengemukakan bahwa pada dasarnya pendidikan dasar identik dengan usaha pemberantasan buta huruf dari bawah. Melalui usaha pendidikan ini, secara tersurat terkandung arti "melek huruf dari bawah" dan sekaligus secara tersirat berarti sebagai usaha pencerahan cara hidup dan pola berpikir sebagai perwujudan manusia yang beradab. Contoh pencerahan atau pembaharuan itu adalah pola kerja yang lebih produktif, pola hidup yang memenuhi syarat kesehatan, organisasi sosial yang humanis dan demokratis, dan kegiatan keagamaan yang lebih membudaya dan rasional.

Terdapat hubungan antara arti yang tersirat dan tersurat dalam konteks pendidikan dasar sebagai usaha pemberantasan buta huruf dari bawah. Dalam hal ini kemampuan melek huruf merupakan prasyarat utama atau pembuka jalan bagi pembaharuan pola hidup yang lebih rasional, humanis, dan demokratis. Oleh karena itu, apabila usaha pemberantasan buta huruf dari bawah ini tidak dilaksanakan secara efektif, seluruh kegiatan formal pendidikan menjadi kurang berarti. Hal di atas dapat digambarkan seperti orang yang memakai selimut yang terlalu pendek; bila selimut itu ditarik ke atas untuk menutupi bagian badan atas maka akan terlihat bagian bawah orang itu. Analog dengan orang berselimut di atas, apabila usaha pemberantasan buta huruf dilaksanakan dari atas, maka bagian badan bawah, pendidikan dasar, akan terbuka dan akan hilanglah hasil pendidikan dasar. Konsekuensi dari ketidakberhasilan pendidikan dasar itu adalah penumpukan beban pendidikan orang dewasa yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Berdasarkan asumsi di atas maka apabila masyarakat dan mereka menghendaki perbaikan dalam pendidikan rakyatnya, syarat mutlakny adalah pembenahan dan pengembangan pendidikan dasarnya; jadi bukan dengan usaha menciptakan kegiatan-kegiatan pendidikan pemberantasan buta huruf dari atas yang pada akhirnya tidak menyelesaikan persoalan, tapi lebih merupakan usaha-usaha pelarian dan menutupi kegagalan.

Searah dengan pengertian pendidikan dasar sebagai usaha pemberantasan buta huruf dari bawah, maka dapat dipahami arti penting pelajaran membaca permulaan bagi siswa kelas satu atau sebelumnya. Pelajaran membaca ini banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan pengenalan anak terhadap bentuk dan warna yang menjadi bidang garapan psikologi pengamatan. Berdasarkan kepustakaan Barat tentang teori pengamatan global yang dipelopori oleh Decroly, di Indonesia kemudian dikembangkan metode membaca permulaan Iin dan Aan, yang kemudian pada saat ini metode SAS telah mendapat tempat terhormat.

Apabila pembahasan pendidikan dasar ini dilanjutkan, maka pendidikan dasar dapat dipersamakan dengan pendidikan kewarganegaraan, meskipun arti kata konsep pendidikan kewarganegaraan agak sedikit berbeda dengan istilah pendidikan *civics* (kewarganegaraan) atau pendidikan moral Pancasila. Apa yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan di sini adalah pendidikan yang diperuntukkan bagi seluruh warga negara, tanpa kecuali dan bersifat keharusan, dengan tujuan agar setiap warga negara menghayati dan mengamalkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Asumsi dasar dari pandangan di atas adalah aspirasi dasar pemerintahan negara diperintah, dilaksanakan oleh dan sepenuhnya diabdikan bagi kepentingan rakyat, sehingga pendidikan kewarganegaraan berusaha mewujudkan dan membina aspirasi ideal tersebut.

Apabila aspirasi cita-cita itu tidak tercapai karena kurangnya pembinaan pendidikan dasar seperti yang diharapkan, maka mungkin yang akan kita saksikan adalah suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh elite sosial atau rakyat yang mengalami perenggutan kebudayaan, sehingga mudah diombang-ambingkan oleh propaganda bombastis murahan dan menyesatkan. Suatu sistem pemerintahan dan kehidupan sosial yang dalam kenyataannya menjadi aristokratis, serta dipimpin oleh elite sosial tertentu, betapapun luhurnya aspirasi tujuan yang akan dicapai, tetap tidak humanistik dan demokratis.

Pendidikan yang sesuai dengan aspirasi demokrasi adalah sistem pendidikan demokratis yang didasarkan pada asas-asas semesta, bebas,

wajib demokratis dan sekuler badan penyelenggaraannya. Asas-asas pendidikan inilah yang merupakan asas-asas pendidikan demokratis yang menurut sejarahnya dikembangkan dan dilaksanakan di negara-negara Eropa Barat, suatu konsep pendidikan yang tidak jatuh dari langit, merupakan hasil perjalanan sejarah panjang dan penuh hambatan yang merintanginya, sehingga hasilnya pun berbeda antara negara Eropa yang satu dengan yang lain apabila coba diterapkan ke dalam sistem pendidikan nasional Indonesia ini.

Semesta sebagai asas pertama dari pendidikan demokratis biasanya diartikan sebagai pendidikan yang diabdikan bagi seluruh lapisan sosial masyarakat tanpa kecuali. Perkembangan sejarah menunjukkan bahwa istilah semesta memiliki dua arti; yang pertama semesta aristokratis dan yang kedua adalah semesta demokratis. Semesta aristokratis adalah suatu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua tetapi dibeda-bedakan menurut strata sosial, ekonomis serta ras. Contohnya pada zaman penjajahan Belanda dikenal sekolah Ongko Loro (rakyat) yang diperuntukkan bagi rakyat pribumi sawo matang, dan HIS disediakan bagi golongan ningrat pribumi, serta ELS dikhususkan bagi golongan kulit putih dan timur asing. Ketiga sistem jalur dan golongan sosial di atas berbeda dalam isi pendidikannya, bahasa pengantar, staf pengajar, dan dengan sendirinya juga jangka waktu dan tingkat pendidikan selanjutnya.

Sebaliknya, yaitu semesta demokratis adalah tidak membedakan segala perbedaan yang telah disebutkan di atas, dengan harapan demokrasi pendidikan merupakan jembatan emas ke arah tercapainya demokrasi sosial dan politik pemerintahan. Pengertian bebas dalam sistem pendidikan demokratis harus diartikan sebagai bebas dari uang sekolah, fasilitas sarana sekolah termasuk buku-buku pelajaran, sehingga hambatan-hambatan akibat faktor-faktor sosial dan ekonomi dapat diatasi, dan tidak terjadi gejala selektivitas ekonomis dan sosial di dalam pendidikan dasar. Dengan demikian pengertian bebas di sini harus hanya dikaitkan dengan pendidikan dasar dan sekaligus memiliki implikasi sampai batas umur tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang kewajiban sekolah ini.

Ini berarti bahwa antara asas kebebasan dan wajib hukum pendidikan dasar, panjang pendeknya ditentukan oleh tingkat perkembangan sosial masyarakat, sehingga dalam masyarakat yang relatif maju batasannya adalah sampai mencapai umur 16 tahun, sedang di Indonesia saat lalu

sampai kelas VI untuk anak usia 12 tahun. Hal demikian ini dapat dimengerti bila diingat bahwa dengan bertambahnya 4 kelas, dari 12 ke 16 tahun, berarti diperlukan jumlah lokal kelas, tenaga pengajar dan penyediaan fasilitas serta anggaran biaya yang tidak sedikit. Hanya masyarakat dan negara maju dan mampu yang dapat memenuhi anggaran tambahan pendidikan dasar yang sangat besar. Kata maju diartikan maju perkembangan teknologi dan industrinya, yang rakyatnya merupakan tenaga kerja yang produktif dan efisien, sehingga dicapai peningkatan taraf hidup yang berada di atas batas bawah sebagai manusia yang layak.

Dua asas terakhir pendidikan demokratis adalah asas demokratis dan sekuler. Yang pertama berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan yang akan ditanamkan dan metode pembinaannya, sedang yang kedua berkaitan dengan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pada tingkat sekolah dasar. Pendidikan dasar yang demokratis harus dapat menanamkan nilai dan sikap demokratis, yang terdiri dari nilai dan sikap yang menghormati prinsip kebebasan, kesamaan, martabat, individualitas manusia, dan pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan bersama pada kerangka kesejahteraan bersama.

Apabila pendidikan dasar yang demokratis dibebankan kepada lembaga-lembaga pendidikan swasta, baik agama maupun non-agama, dikawatirkan terjadi gejala ketidaksamaan kualitas pendidikan. Hal itu disebabkan karena sifat selektif dan tidak demokratis yang pada akhirnya juga mengakibatkan ketidakmerataan secara kuantitatif, sebagai konsekuensi terbatasnya sumber dana lembaga swasta. Untuk menghindari gejala negatif sifat selektif itu, negara harus menerima tanggung jawab sebagai penyelenggara pendidikan dasar bagi seluruh rakyatnya, sehingga tercapai negara sejahtera yang diinginkan.

Terdapat beberapa prakondisi yang harus dipenuhi agar dapat tercapai tujuan pendidikan dasar yang demokratis, seperti tersedianya ahli perencanaan pendidikan yang sanggup membumikan konsep ke dalam praksis, tingkat taraf hidup di atas minimal, tingkat perkembangan teknologi, perkembangan industri dan lapangan kerja yang dapat digunakan sebagai sumber dana penyelenggaraan pendidikan, penekanan pertumbuhan penduduk, tercapainya rasio guru murid 1 berbanding 33, serta struktur populasi yang seimbang antara berbagai tingkat umur.

Pada periode tahun 50-an badan PBB UNESCO menerbitkan majalah catur bulanan, *Fundamental Education*, yang berisi masalah-masalah yang

berhubungan dengan tujuan, isi, metode, serta sarana dan bentuk-bentuk evaluasi apa yang disebut dengan pendidikan fundamental. Istilah pendidikan fundamental diberikan kepada pendidikan orang dewasa (*adult education*) di banyak negara, baik yang belum maju, berkembang, maupun yang telah maju. Jenis pendidikan ini merupakan kegiatan sosial yang bernilai pendidikan bagi individu tanpa dibatasi oleh tingkat umur tertentu. Secara lebih jelas, pendidikan fundamental memiliki tujuan untuk membekali individu di semua tingkat usia dengan kemampuan-kemampuan untuk hidup sebagai manusia (Saifulah, 1983). Dengan demikian pendidikan fundamental dapat diberikan kepada anak-anak atau orang dewasa, dapat diberikan kepada masyarakat kota atau desa terpencil, dan dengan menggunakan atau tidak menggunakan metode belajar konvensional sebagaimana yang dikenal.

Tujuan lebih khusus pendidikan fundamental adalah untuk membantu individu-individu, anak atau orang dewasa agar mampu mendidik diri mereka sendiri. Menurut Alex W. Graham (Dalam Ruopp, 1953:210) tujuan itu dapat dirinci menjadi tiga. Pertama, agar mereka sebagai tenaga kerja mampu mengontrol lingkungan fisik mereka dan melestarikan serta mengeksplorasi sumber-sumber lingkungan untuk usaha peningkatan taraf hidup mereka. Kedua, agar mereka sebagai individu mampu merealisasikan dan mengembangkan bakat kemampuannya, sehingga dapat dicapai kehidupan fisik yang sehat, mengembangkan sikap harga diri melalui pengembangan kegiatan mental, moral dan kerohanian, serta pembinaan dan pencapaian aspirasi-aspirasi. Ketiga, sebagai warga negara mampu hidup bersama dengan keluarga, golongan, masyarakat, suku bangsa dan bahkan suatu ketika dengan masyarakat global.

Untuk memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan dasar di Asia, maka merupakan sesuatu yang bermakna untuk mempelajari instrumen konsepsional tentang cara-cara menyusun pendidikan yang berimbang bagi negara-negara di Asia, seperti telah dilakukan oleh para wakil negara-negara Asia dalam beberapa konferensi internasional. Salah satu konferensi itu berlangsung di Karachi (1950—1960), yang bertujuan untuk mengembangkan *draft* model Asia dan peninjauan kemungkinan pelaksanaannya. Terdapat beberapa kegiatan penting dalam konferensi tersebut, seperti: inventarisasi tingkat kemampuan perencanaan anggaran, biaya pelaksanaan dan sumber dana yang tersedia; perumusan masalah dan kendala yang dihadapi; kerjasama dalam implementasi program;

tukar menukar alternatif teknik dan prosedur yang paling memberikan harapan; pendirian pusat-pusat penelitian pengembangan regional; fokus kegiatan dan perencanaan adalah pengembangan ideal pada 1980 tentang pendidikan dasar yang semesta, bebas dan wajib (Miller, 1968:4—8).

Rekomendasi dari konferensi ini menyatakan bahwa implementasi sekolah dasar 9 tahun yang demokratis tercapai pada 1980. Prioritas usaha diletakkan pada peningkatan kualitas dengan tidak mengabaikan segi kuantitas, perencanaan pendidikan harus selalu dikoordinasikan dengan perencanaan sosial, ekonomi, ataupun politik pemerintah, pembangunan masyarakat desa harus mendapat penanganan serius, dan akhirnya perencanaan harus ditekankan kepada pengembangan ahli perencanaan, administrator, dan penyelia pendidikan, penyediaan guru yang memenuhi syarat, serta ketersediaan gedung dan fasilitas lain seperti buku dan laboratorium.

Konferensi menengarai kemungkinan timbulnya kendala-kendala dalam pelaksanaan *draft* itu. Kemungkinan kendala itu adalah target yang terlalu ambisius karena di luar batas kemampuan negara-negara yang bersangkutan, pandangan yang terlalu berlebihan tentang kontribusi pendidikan dalam pembangunan padahal negaranya masih miskin akibat kehidupan ekonomi pedesaan tradisional, dan sulitnya menetapkan kriteria penilaian kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara anggota.

Selanjutnya, konferensi Karachi juga membuat ramalan bahwa sampai 1980 keadaan pendidikan dasar di Asia adalah sebagai berikut. Pertama, terjadi peningkatan jumlah anak yang masuk sekolah dasar menjadi 90% dari 39,7% pada 1959, karena jumlah anak pada 1980 merupakan 24% penduduk dunia. Kedua, dibutuhkan penambahan ketersediaan jumlah guru yang memenuhi syarat. Jumlah guru yang memenuhi syarat adalah lebih dari 3 juta, sehingga dapat dicapai rasio ideal 1:36. Pada pertemuan itu belum dicapai kesepakatan tentang jenjang guru yang dianggap memenuhi syarat, yaitu antara 1 tahun setelah sekolah menengah pertama sampai 2 tahun setelah sekolah menengah umum. Kriteria itu sebenarnya sangat penting, terutama untuk diakui sebagai pekerja profesional karena lama pendidikan persiapannya.

PERMASALAHAN PENDIDIKAN BERKENAAN DENGAN WAJIB 9 TAHUN

Perkembangan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Indonesia

Apabila direnungkan dengan kenyataan yang terjadi di Indonesia, asumsi tentang kemungkinan timbulnya faktor eksternal, seperti peristiwa konflik politik di dalam negeri dan konflik dengan negara lain, atau pada masa kini krisis moneter, terlupakan untuk diperhitungkan oleh para peserta konferensi pendidikan Asia di Karachi. Idealisme lama pendidikan dasar 7 tahun seperti telah direkomendasikan konferensi itu, ternyata dapat dilampaui oleh Indonesia, yang kini secara formal telah dapat mencapai lama wajib belajar 9 tahun.

Dengan lahirnya UUSPN tahun 1989 yang mengatur sistem pendidikan nasional secara legal formal, akan timbul perubahan-perubahan yang mendasar dalam sistem pendidikan nasional. Salah satu perubahan itu adalah perubahan sistem pendidikan dasar dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Secara umum perubahan itu dimaksudkan agar subjek didik sebagai generasi muda dapat mencapai suatu idealisme manusia Indonesia seutuhnya yang mampu menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan zaman (Notonagoro, 1987).

Menindaklanjuti konferensi Karachi, kemudian dilaksanakan konferensi yang lain di Tokyo, Manila, dan kota-kota lain di Asia. Beberapa pertemuan ilmiah itu akhirnya melahirkan ide tentang pendidikan dasar 9 tahun. Berdasar pada konsep di atas kemudian pemerintah Indonesia mencanangkan pendidikan dasar 9 tahun, dan bukan 7 tahun seperti tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989 (Depdikbud, 1990).

Di samping keberhasilan untuk secara formal meningkatkan wajib belajar 6 tahun menjadi 9 tahun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak anak usia sekolah 5—14 tahun yang mengalami keadaan putus sekolah. Ditengarai fenomena itu terjadi karena kualitas pendidikan dan sumber dana yang kurang memadai untuk menunjang idealisme wajib belajar 9 tahun. Dengan kata lain, idealisme sekolah dasar 9 tahun pada 1980 seperti telah direkomendasikan konferensi Karachi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, belum tercapai di Indonesia. Sisi kuantitatif banyak terkait dengan terbatasnya ketersediaan jumlah guru, sedang segi kualitatif berhubungan erat dengan kualitas pendidikan persiapan guru sebagai tenaga pelaksana. Di Indonesia pendidikan

persiapan guru masih dalam tahap pencarian bentuk dalam usaha membangun sistem pendidikan dasar yang mampu mendidik generasi muda menjadi manusia yang menghormati nilai normatif pandangan hidup Pancasila.

Sebenarnya masalah masih rendahnya kualitas dan kuantitas pendidikan dasar di Indonesia, tidak dialami oleh Indonesia saja. Secara umum dapat dilihat bahwa negara-negara sedang berkembang, terutama pada era 1960-an dan 1970-an, sangat mengutamakan ekspansi besar-besaran pada aspek fasilitas fisik dari pendidikan sekolah, dan kurang memberi perhatian pada kualitas pengajarannya sendiri. Pada perkembangan selanjutnya, negara-negara berkembang di era 1980-an dan 1990-an mulai memikirkan secara lebih cermat mutu dan kualitas pendidikan dasarnya (Stephens, 1990).

Tinjauan Paedagogis Persoalan Wajar 9 Tahun

Permasalahan lama wajib belajar 9 tahun ini menarik untuk dikaji, terutama karena Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) telah mengujicobakan sistem pendidikan dasar 8 tahun di bawah sistem satu atap, satu kepala sekolah, satu unit administratif, dan menerapkan sistem kredit semester. Dengan memperhatikan uji coba PPSP selama lebih dari satu dekade itu, sistem pendidikan dasar 9 tahun yang diintroduksikan di Indonesia nampaknya kurang memperhatikan hasil penelitian rintisan yang telah menghabiskan banyak dana, tenaga, dan waktu.

Sebenarnya keberadaan sekolah laboratorium semacam PPSP itu sangat vital dalam suatu pengembangan sistem pendidikan nasional dan pengembangan teori pendidikan pada umumnya (Beeby, 1979). Pembaharuan suatu sistem sekolah hanyalah suatu usaha kegiatan pengembangan yang bersifat tambal sulam apabila tidak memperhatikan hasil penelitian empirik yang relevan (Connole, Smith & Wiseman, 1993). Ini berarti merupakan suatu usaha pembaharuan pendidikan yang kurang berdasar dan tidak didukung oleh data hasil penelitian ilmiah.

Efisiensi Pendidikan dalam Sistem Satu Atap

Suatu sistem organisasi sekolah terpadu SD dan SMP di bawah satu nama pendidikan dasar 9 tahun merupakan suatu objek yang ideal untuk dipertimbangkan. Pertimbangan itu terutama berdasar pada tinjauan:

organisasi administratif, aspek psikologis, dan penyediaan dana penyelenggaraan pendidikan.

Dari aspek organisasi administratif, suatu penyederhanaan tata laksana kegiatan pengelolaan proses pendidikan secara efisien melalui penyederhanaan birokrasi perlu dipertimbangkan. Dalam hal ini keterpaduan organisatoris yang integral di antara sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama harus dilaksanakan secepatnya. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar SD dan SLTP saat ini masih menganut sistem yang saling terpisah, misalnya setiap SD dan SLTP memiliki kepala sekolah dan sistem administrasi sendiri-sendiri. Keterpaduan organisatoris itu sangat diperlukan, mengingat bahwa efektivitas proses pendidikan mengacu kepada kerangka wajib belajar 9 tahun yang bersifat sinambung.

Termasuk dalam aspek ini adalah kegiatan tugas supervisi pendidikan yang akan meningkatkan kualitas pelayanan, baik bagi peningkatan jabatan guru maupun tuntutan perkembangan psikologis setiap subjek didik. Dengan keterpaduan organisatoris SD dan SLTP maka kualitas pelayanan guru terhadap subjek didik menjadi lebih efektif. Selain itu keterpaduan sistem SD dan SLTP juga akan memudahkan proses supervisi terhadap kemungkinan peningkatan kualifikasi atau jabatan mengajar seorang guru.

Keterpaduan pendidikan SD dan SMP juga memiliki nilai lebih apabila ditinjau dari keterjangkauan sumber dana. Hal itu terjadi karena dengan diperluasnya sekolah maka secara logis akan lebih lengkap pula fasilitas pendidikan yang memenuhi persyaratan ilmiah dan pendidikan. SD dan SMP terpadu akan memiliki perpustakaan, laboratorium, dan sarana olah raga, yang sangat menunjang pelaksanaan proses operasional kependidikan.

Sistem satu atap dalam kedua tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas pelayanan supervisi pendidikan. Dalam konteks ini, sekolah memiliki seorang guru kepala dan pendamping untuk seluruh bidang studi yang disajikan sesuai dengan kurikulum. Misalnya, guru matematika bertanggung jawab atas peningkatan jabatan guru matematika di semua jenjang kelas. Di samping itu, guru kepala bertanggung jawab menjaga keterkaitan dan kontinuitas yang sinambung di antara bahan-bahan pelajaran kelas yang lain. Akhirnya sistem ini dengan sendirinya akan meningkatkan kualitas pelayanan akademis guru secara khusus dan sekolah pada umumnya bagi setiap murid yang berada di bawah asuhannya.

Dari aspek keterpaduan ini pula dapat diambil nilai lebih lainnya, yaitu penghapusan sistem ujian negara untuk menentukan kelulusan siswa SD. Sistem ujian negara banyak menghabiskan dana dan merupakan sistem evaluasi pendidikan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan apabila ditinjau dari supervisi kependidikan. Sistem supervisi tak langsung melalui prosedur sekolah laboratorium dan sistem ujian negara pada dasarnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesadaran kesatuan nasional. Akan tetapi ujian negara merupakan sistem evaluasi yang bersifat mental dan mengarah kepada penekanan dalam aspek pendidikan kecerdasan individual. Di negara-negara maju, seperti Australia, ujian negara sekolah dasar tidak wajib diikuti.

Untuk mengatasi kelemahan sistem ujian negara yang terkadang terlalu intelektualistis, dianjurkan untuk membuat sistem ujian yang bersifat lokal. Keuntungan ujian yang bersifat lokal adalah bersifat luwes, serta mampu memenuhi kebutuhan dasar dan sosial siswa pada daerah tertentu. Untuk mengatasi kelemahan standarisasi nasional, maka pada pembuatan soal ujian-ujian lokal itu perlu disertakan kisi-kisi umum yang bersifat baku.

Sistem terpadu SD dan SMP juga memberi nilai lebih ditinjau dari aspek psikologi perkembangan dan psikologi sosial anak didik. Anak akan tidak mengalami stres karena penyesuaian psikologis akibat keharusan berpindah dari suatu SD ke SLTP yang berbeda. Stres yang disebabkan oleh perpindahan itu dapat memberi pengaruh bagi perkembangan intelektual anak yang sedang mengalami proses tumbuh kembang. Perpindahan sekolah itu dapat menyebabkan gangguan penyesuaian sosial anak, seperti guru dan personalia yang berbeda dibanding sekolah asal yang memiliki latar belakang iklim pendidikan, pengalaman, dan kepribadian yang berbeda.

Gejala psikologis berupa penyesuaian sosial itu nampaknya sederhana, namun sangat kritis, peka, dan menentukan bagi anak yang sedang mengalami masa transisi dari masa sekolah ke masa sosial. Beban psikologis pada proses transisi itu diperberat dengan timbulnya perubahan bio-fisiologis yang mengakibatkan perubahan fisik dalam diri anak. Penyesuaian bio-fisiologis yang tidak dapat diatasi akan dapat memperlambat perkembangan aspek-aspek kepribadian yang lain. Dapat disimpulkan bahwa si puber itu menerima beban tiga aspek transisional pada saat mereka berpindah dari SD ke SMP, yaitu beban bio-fisiologis, sosial psikologis, dan sosio-intelektual yang cukup berat.

Pendidikan Persiapan Guru

Masih terkait dengan peran guru sebagai ujung tombak keberhasilan pendidikan di masa mendatang, secara psikologis perkembangan dan profesionalitas lulusan program D2 PGSD dan program S1 kependidikan dasar cukup dapat dipertanggungjawabkan untuk mengemban tugas tersebut. Dalam hubungan ini, proyeksi ke depan adalah keterkaitan antara kecepatan pertumbuhan penduduk dengan jumlah animo dan lulusan kedua program tersebut yang harus mendapat perhatian serius, sehingga kedua percepatan itu akan seimbang. Pada tahun-tahun awal milenium ketiga, keseimbangan tersebut diharapkan dapat dicapai secara maksimal. Hambatan lain yang mungkin timbul adalah keengganan guru-guru yang kompeten untuk ditempatkan di daerah terpencil dan tertinggal. Akibatnya pendidikan kewarganegaraan akan gagal, sehingga kestabilan politik, ekonomi, serta sosial menjadi semu, yang pada akhirnya akan menimbulkan "kemandekan kebudayaan".

PENUTUP

Beberapa kesimpulan dapat dikemukakan berikut ini. Pertama, penyelenggaraan program pendidikan 9 tahun merupakan upaya untuk mewujudkan salah satu tujuan perjuangan negara Indonesia, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang akan meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara demokratis. Kedua, penyelenggaraan program pendidikan 9 tahun merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas perkembangan kebudayaan masyarakat dan bangsa sesuai dengan prinsip dasar pendidikan sebagai unsur sekaligus instrumen kebudayaan dalam rangka membudayakan manusia. Ketiga, penyelenggaraan program pendidikan 9 tahun merupakan bukti kemajuan perkembangan kebudayaan manusia Indonesia. Keempat, penyelenggaraan program pendidikan 9 tahun merupakan bukti peningkatan kualitas hidup dan taraf hidup bangsa Indonesia, karena diperlukan penambahan dana, waktu, dan tenaga untuk penambahan masa kewajiban belajar. Kelima, penyelenggaraan program pendidikan 9 tahun merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan profesional tenaga kerja Indonesia. Keenam, penyelenggaraan program pendidikan 9 tahun merupakan upaya untuk menyiapkan *filter* dan penyangga bangsa dan masyarakat Indonesia dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berkenaan dengan uraian di atas dapat diajukan beberapa saran berikut ini. Pertama, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai filsafat pendidikan dasar agar tujuan nasional dapat tercapai. Kedua, perlu dikembangkan infrastruktur dalam sistem pendidikan dasar 9 tahun sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai, yang meliputi ketersediaan dana, jumlah sekolah, kualitas guru, seleksi masuk SLTP, dan penghapusan Ebtanas SD. Ketiga, penekanan pada fase kemandirian dan kreativitas pada minat dan bakat sesuai dengan usia perkembangan anak tiga tahun terakhir. Keempat, sistem pendidikan SD dan SLTP terpadu memberikan nilai lebih, ditinjau dari sudut administrasi organisasi pendidikan, psikologi perkembangan, psikologi sosial, dan supervisi pendidikan. Kelima, penghapusan sistem ujian negara dapat menekan biaya yang tidak sedikit pada tingkat sekolah dasar. Keenam, perlu ada keharusan untuk menyelenggarakan sistem sekolah laboratorium dalam setiap proses pengembangan sistem pendidikan dan kurikulum. Ketujuh, sistem perjenjangan 8 tahun untuk sekolah dasar komprehensif dan 4 tahun untuk sekolah menengah layak dipertimbangkan untuk diujicobakan kembali. Kedelapan, pada kurang lebih tahun 2010 atau sekurangnya 2020 pendidikan dasar 8 tahun diharapkan telah terselenggara dengan mantap. Kesembilan, pada tahun tersebut lulusan D2 PGSD telah siap menerima tanggung jawab tersebut dengan penuh dedikasi dan kualitas akademis serta profesional yang dapat diandalkan. Kesepuluh, pada tahun tersebut diharapkan program Inpres Desa Tertinggal telah tuntas dan kendala-kendala faktor ekologis dapat diatasi, sehingga pendidikan dasar 8 tahun akan berkembang dengan mantap.

DAFTAR RUJUKAN

- Beeby, C.E. 1979. *Pendidikan Di Indonesia: Penilaian dan Pedoman Perencanaan*. Jakarta: LP3ES.
- Connole, H.C., Smith, B. dan Wiseman, R. 1993. *Research Methodology 1: Issues and Methods in Rresearch, A Study Guide*. Geelong: Deakin University.
- Diaz, C. 1992. The Next Millennium: A Multicultural Imperative for Education. Dalam Diaz, C. (Ed.). *Multicultural Education for the 21th Century*. Washington DC: National Education Association.
- Depdikbud. 1990. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 1989*. Jakarta: Depdikbud.
- Goslin, D.A. 1965. *The Schools in Contemporary Society*. New York: Scott Forestman and Company.

- Miller, T.W.G. 1968. *Education In South-East Asia*. Sydney: Ian Novak Publishing Company.
- Notonagoro, S. 1987. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ruopp, P. 1953. *An Approach to Community Development*. Bandung: Van Hoeve, The Hague.
- Saifullah, A. 1983. *Pendidikan Internasional dan Adult Education*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Stephens, D. 1990. Qualitative Factors in Education, Research and Development: A Position Paper. *Educational Development*. Vol.10, No.2/3, hlm. 143-149.